



KEGIATAN FISIK MAKIN TERBATAS

Pemkot Yogyakarta Efisienkan Belanja Modal

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bakal mengefisienkan belanja modal untuk menghadapi pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang ditetapkan pemerintah pusat dalam APBN 2026. Kondisi ini mempengaruhi ruang fiskal untuk kegiatan fisik yang semakin terbatas.

"Yang diefisienkan belanja modal, seperti membangun infrastruktur atau memperbaiki jalan. Beberapa kegiatan yang sifatnya belanja modal itu tidak akan direalisasikan dulu," ujar Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dikutip *Antara* di Yogyakarta, Kamis (9/10).

Hasto menjelaskan efisiensi dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan berkurangnya dana transfer dari



Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo (kiri) bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan.

pusat sekitar Rp250 miliar atau setara 21-26 persen dari total alokasi.

Hingga kini, pemerintah kota masih menunggu ke-

pastian melalui daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2026. "Kalau seandainya dipotong 21 persen sampai 26 persen, berarti

berkurangnya sekitar Rp250 miliar. Itu estimasi kami, karena DIPA yang pasti belum turun," ujar Hasto.

Ia menyebut total APBD Kota Yogyakarta mencapai lebih dari Rp2 triliun, dengan porsi belanja pegawai sekitar 41 persen.

Sementara itu, Hasto memastikan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tidak akan terimbas pemangkasan karena termasuk mandatory spending atau belanja wajib yang dilindungi aturan. "Pendidikan tidak (terkena pengurangan) karena itu sudah wajib dialokasikan. Malah ada penambahan, termasuk kesehatan karena ada paket wajib pemeriksaan gratis. Jadi, pendidikan dan kesehatan bisa memakan 47 persen sendiri," ujarnya.

Dengan demikian, ia mengakui ruang fiskal pemerintah kota untuk kegiatan fisik makin terbatas.

Hasto memperkirakan belanja modal pada 2026 hanya dapat direalisasikan sekitar 7 persen dari total anggaran, sehingga sejumlah proyek infrastruktur kemungkinan ditunda pelaksanaannya. Kendati menghadapi tekanan anggaran, Hasto menilai posisi fiskal Kota Yogyakarta masih relatif lebih kuat ketimbang kabupaten lain di DIY karena memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang mendekati Rp1 triliun.

"Kalau kabupaten kan PAD-nya Rp 300-400 miliar, jadi beban belanja pegawainya lebih berat. Kami normalnya 30 persen. Kalau pembaginya dikurangi kare-

na transfer pusat turun, otomatis persentasenya naik, tapi bukan berarti belanja pegawainya bertambah," tuturnya.

Secara nasional, alokasi dana TKD dalam rancangan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp 864 triliun atau dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Sebagai kompensasi, Kemenkeu memutuskan untuk menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/ lembaga hingga sekitar Rp 1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp 900 triliun. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005